


Pelatihan Persiapan Penerapan Blud (Badan Layanan Umum Daerah) Pada Smk Di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)

¹⁾Kusuma Ratnawati*, ²⁾Christin Susilowati

¹⁾Management Department, Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya, Indonesia

Email Corresponding: kusuma@ub.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Badan layanan umum daerah Pelatihan Workshop SMK	Revitalisasi yang pemerintah pada jenjang SMK dengan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Perubahan sistem manajemen dari sentralisasi menjadi desentralisasi melalui konsep New Public Management (NPM). Penerapan konsep NPM pada lingkungan daerah disebut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama peserta didik berupa barang/jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan, sehingga dapat menjadi wadah simulasi industri bagi peserta didik dalam mengasah kompetensinya dan melahirkan berbagai produk-produk unggulan yang layak untuk dipasarkan di masyarakat. Fenomena yang terjadi, terdapat 23 SMK yang belum dapat menerapkan BLUD. Hal ini dikarenakan belum memenuhi persyaratan terkait dengan perencanaan bisnis dan pelayanan, dan infrastruktur yang kurang memadai, seperti peralatan, sumber daya manusia, produk unggulan yang diterima oleh pasar. Oleh sebab itu, perlu adanya pelatihan dalam persiapan penerapan BLUD serta penyusunan rencana bisnis dan anggaran RBA BLUD yang menjadi stimulus mempercepat terealisasinya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejumlah SMK di NTB.
Keywords: Keywords_1 Regional public service agency Training Workshop Vocational high school	ABSTRACT <p>The government's revitalization efforts in the vocational high school (SMK) sector involve providing services to the community. There has been a shift in the management system from centralization to decentralization through the concept of New Public Management (NPM). The implementation of the NPM concept at the regional level is known as the Regional Public Service Agency (Badan Layanan Umum Daerah or BLUD), which is established to provide services to the community, particularly students, in the form of goods/services without prioritizing profit. This setup serves as a platform for industrial simulation for students to hone their skills and generate various outstanding products worthy of marketability in the community.</p> <p>However, there is a phenomenon where 23 vocational high schools have yet to implement BLUD. This is due to not meeting requirements related to business and service planning, as well as inadequate infrastructure such as equipment, human resources, and marketable flagship products. Therefore, there is a need for training to prepare for the implementation of BLUD, including the formulation of business plans and budgeting for BLUD RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran). This training serves as a stimulus to accelerate the realization of the Regional Public Service Agency (BLUD) in several vocational high schools in West Nusa Tenggara (NTB).</p> <p style="text-align: right;">This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p> 

I. PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya memajukan bangsa. Hal ini juga dilakukan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Presiden Republik Indonesia telah memberikan intruksi terkait revalidasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tertera pada intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Intruksi tersebut ditujuakn kepada 12 menteri Kabinet Kerja, terutama kepada

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga pemerintah daerah untuk segera mengambil Langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing untuk merevitalisasi SMK. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Instruksi lain yang diberikan oleh Presiden adalah menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK.

Pada jenjang tersebut, SMK bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga harus dapat melayani masyarakat. Untuk menuju lembaga yang dapat melayani masyarakat, diperlukan persiapan yang matang dan komitmen yang kuat. Kenyataannya, keadaan di lapangan menunjukkan banyak permasalahan yang sedang terjadi seperti maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh kembali kepercayaan masyarakat dan meningkatkan pelayanan adalah perlunya perubahan sistem manajemen dari sentralisasi menuju desentralisasi melalui konsep New Public Management, merupakan pilihan yang tepat untuk dilakukan oleh pemerintah (Osbrone & Gaebler,1992). Penerapan NPM pada organisasi publik diharapkan agar pemerintah dapat mengganti sistem sentralisasi dengan desentralisasi yang lebih fleksibel dan peka terhadap kebutuhan pasar.

Penerapan konsep New Public Management/NPM pada reformasi Pemerintah terkait manajemen keuangan adalah Badan Layanan Umum (BLU). Konsep BLU lahir dan muncul dari reformasi sektor publik di Inggris pada tahun 1980-an semasa Perdana Menteri Margareth Thatcher membuat Institusi Publik yang lebih otonom dengan tata kelola seperti swasta (private-like manner) (Bolick, 1995; Kajimbwa, 2013). Institusi publik yang semi otonom dan dikelola secara entitas bisnis tersebut disebut dengan "the next step agencies". Negara lain juga melakukan hal yang sama seperti Agentschappen di Belanda, Special Operating Units (SOAs) di Kanada, Independent Administrative Institution (IAIs) di Jepang dan negara-negara lainnya. Adanya independensi pengelolaan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan praktek bisnis yang sehat (Yamamoto, 2003).

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum (BLU) terdapat di lingkungan pemerintah pusat, sedangkan pada pemerintah daerah disebut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penerapan BLUD di beberapa instansi, antara lain Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, dan instansi pemerintah lainnya. Pendapatan yang diperoleh BLU merupakan Penerimaan Bukan Pajak/PNBP, sedangkan pendapatan BLUD merupakan lain-lain Pendapatan Asli Daerah/PAD yang sah bagi suatu daerah.

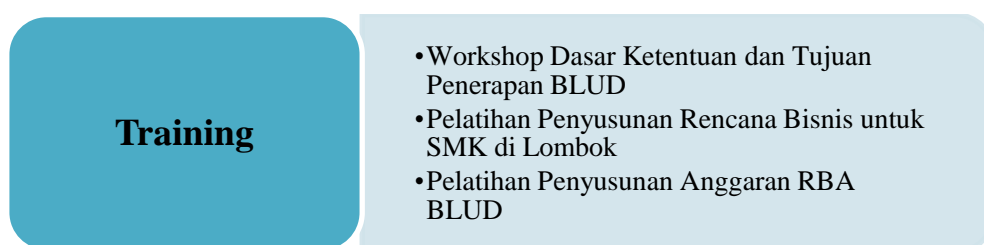
Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) juga diterapkan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). BLUD SMK sendiri merupakan unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama peserta didik berupa barang/jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Pada SMK yang sudah BLUD akan diberikan fleksibilitas dalam bentuk keleluasaan pengelolaan keuangan atau barang BLUD SMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan dengan adanya BLUD SMK dapat menjadi wadah simulasi industri bagi peserta didik untuk mengasah kompetensinya serta melahirkan berbagai produk-produk unggulan yang layak untuk dipasarkan di masyarakat sehingga dapat terimplementasi teaching factory dan PBL.

Fenomena pada SMK yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) belum seluruhnya menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini juga disampaikan langsung Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB (Nusa Tenggara barat) (Imansyah, 2023), menyatakan bahwa terdapat 23 SMK yang sedang merampungkan perubahan di NTB untuk menjadi BLUD pada tahun 2023. Sejumlah SMK yang diajukan menjadi BLUD meliputi SMKN 1 Mataram, SMKN 2 Mataram, SMKN 4 Mataram, SMKPPN Mataram, 5 SMKN 1 Gerung, SMKN 1 Lembar, SMKN 1 Narmada, SMKN 1 Kuripan, SMKN 1 Praya Tengah, SMKN 1 Pujut, SMKN 2 Selong, SMKN 1 Pringgabaya, SMKN 1 Sikut, SMKN 1 Sakra, SMKN 1 Keruak, SMKN 1 Pemenang, SMKN 1 Sumbawa, SMKN 3 Sumbawa, SMKN 1 Alas, SMKN 1 Buer, SMKN 1 Kota Bima dan SMKN 3 Kota Bima. Perwujudan BLUD SMK menjadi hambatan bagi pemerintah daerah terutama pemerintah NTB dalam menunjang kualitas dan daya saing lulusan SMK di NTB. Masalah yang dihadapi adalah adanya sejumlah persyaratan yang belum dapat dipenuhi guna menjadi SMK BLUD, yaitu belum memiliki perencanaan bisnis dan pelayanan, dan tidak memiliki infrastruktur yang memadai, seperti peralatan, sumber daya manusia, produk unggulan yang diterima oleh pasar. Oleh sebab itu, perlu adanya

pelatihan dalam persiapan penerapan BLUD serta penyusunan rencana bisnis dan anggaran RBA BLUD yang menjadi stimulus mempercepat terealisasinya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejumlah SMK di NTB.

II. METODE

Solusi yang ditawarkan sesuai dengan prioritas permasalahan yang dialami oleh mitra sasaran, yaitu pada proses awal akan dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan persiapan penerapan BLUD. Pengajuan 23 SMK yang belum lolos atau disetujui menjadi BLUD dikarenakan persyaratan yang tidak terpenuhi. Dalam hal ini, mitra akan membantu dalam mempersiapkan sekolah SMK yang masih belum memenuhi kriteria menjadi BLUD dengan melakukan pelaksanaan pelatihan persiapan penerapan BLUD. Kemudian, melalui pelatihan penyusunan rencana bisnis dan anggaran RBA BLUD akan membantu mitra dalam perencanaan program kerja dan kegiatan hingga penganggaran BLUD. Oleh karenanya, Metode pelatihan akan menggunakan konsep workshop yang berisi materi dan praktik. Pengisi materi berasal dari praktisi dan akademisi. Keahlian dan kemampuan pengisi materi akan disesuaikan dengan kebutuhan mitra sasaran. Target peserta pelatihan ini adalah SMK di Lombok yang belum menjadi BLUD.



Gambar 1. Aktivitas Utama Pelatihan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan pengabdian yang berjudul “Pelatihan Persiapan Penerapan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) untuk SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)” dilakukan secara langsung dengan didampingi dan diawasi oleh mitra pengabdian, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB (Nusa Tenggara Barat). Kegiatan pengabdian kali ini telah dilakukan dengan meliputi beberapa tahap kegiatan yang tercakup pada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tim pengabdian melakukan peninjauan lapang sebagai tahap awal persiapan kegiatan di SMKN 3 Selong yang bertujuan untuk melakukan identifikasi dan menggali informasi pokok permasalahan yang dialami oleh Kepala Sekolah SMK dalam penerapan BLUD di SMK, serta penyusunan konsep kegiatan pelatihan apa yang sesuai untuk menjawab permasalahan yang di alami oleh mitra pengabdian.



Gambar 2. Persiapan Pelatihan untuk Implementasi BLUD

Tahapan kedua yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah melakukan penyusunan materi yang akan disampaikan pada saat kegiatan berlangsung. Penyusunan materi tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang dimiliki oleh mitra dengan menggunakan 4 (empat) metode, yaitu metode Ceramah, metode Tutorial, dan metode Diskusi. Langkah awal menggunakan metode Ceramah diawali oleh pemateri pengabdian (Dr. Christin Susilowati, SE., M.Si., CSRS., CHRNLNLP.) dengan memberikan materi dengan topik “Dasar Ketentuan dan Tujuan Penerapan BLUD” yang ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada kepala sekolah SMK terkait pentingnya memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, sehingga dapat membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah. Kemudian, mitra pengabdian mendapatkan pemaparan materi ke-dua dengan topik “Penilaian Administratif BLUD dan Pola Tata Kelola BLUD”. Tujuan dari materi ke-dua ini adalah pemahaman kepada kepala sekolah SMK bahwasannya pola tata kelola BLUD SMK dapat memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan praktik bisnis yang sehat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



Gambar 3. Ketentuan Pokok dan Tujuan Penyelenggaraan BLUD

Metode Ceramah berikutnya dilanjutkan oleh ketua tim (Dr. Dra. Kusuma Ratnawati, MM., CFP.) dengan memberikan materi mengenai “Rencana Strategis BLUD dan Standar Pelayanan Minimal BLUD”. Kegiatan kedua ini dilaksanakan dalam jeda satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar ketentuan dan tujuan penerapan BLUD, serta penilaian administratif BLUD pemasaran produk UMKM melalui penggunaan media sosial. Sesi pelatihan strategi pemasaran ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2023. Topik pembahasan materi kali ini memperkuat pandangan peserta dalam memahami penentuan arah dan penetapan kebijakan dalam melaksanakan pelayanan BLUD Unit Kerja dengan durasi kegiatan selama 60 menit. Pemateri menekankan peran penting dalam memberikan acuan untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggung jawaban penyelenggaraan pelayanan. Hal ini dikarenakan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait definisi operasional, indikator kinerja, ukuran/satuan, pembilang dan penyebut, perhitungan, sumber data, langkah kegiatan dan kebutuhan sumber daya manusia. Dengan adanya dokumen SPM, maka dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, ketanggapan kebutuhan dalam melakukan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna.



Gambar 4. Rencana Strategis BLUD dan Standar Pelayanan Minimal BLUD

Dalam rangka penerapan BLUD untuk meningkatkan kualitas pendidikan SMK, maka tim pengabdian memberikan materi ke-empat dengan judul kegiatan adalah “Laporan Keuangan BLUD”. Tujuan dari laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dimiliki. Sesi ini berlangsung selama 90 menit, dimana pemateri memberikan arahan kepada mitra pengabdian untuk mencoba dan menganalisa kasus laporan keuangan BLUD di SMK. Setelah sesi ini selesai, mitra pengabdian diberikan waktu selama 30 menit untuk sesi tanya jawab (metode Diskusi) kepada pemateri.

IV. KESIMPULAN

SMK yang ada di Nusa Tenggara Barat belum seluruhnya menjadi BLUD. Masalah yang dihadapi adalah adanya sejumlah persyaratan yang belum dapat dipenuhi guna menjadi SMK BLUD, yaitu antarain lain SMK belum memiliki perencanaan bisnis dan pelayanan, infrastruktur yang cukup seperti peralatan dan SDM, serta produk unggulan yang dapat diterima oleh pasar. BLUD SMK sendiri merupakan unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama peserta didik berupa barang/jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Pada SMK yang sudah BLUD akan diberikan fleksibilitas dalam bentuk keleluasaan pengelolaan keuangan atau barang BLUD SMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pengabdian Mitra Mengabdi FEB UB yang diketuai oleh Dr. Dra. Kusuma Ratnawati, MM., CFP. dengan judul “Pelatihan Persiapan Penerapan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) untuk SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)” memiliki tujuan memberikan 23 Kepala Sekolah SMK di Lombok pemahaman dan persiapan tentang penerapan BLUD di SMK. Dengan adanya pemahaman tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan untuk mempercepat penerapan BLUD pada 23 SMK di Lombok. Saat ini progress kegiatan yang telah dilakukan mencapai hasil 100%. Dalam segi kegiatan, seluruh pelaksanaan kegiatan pelatihan telah berhasil dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Bolick, C. (1995). Thatcher’s Revolution: Deregulation and Political Transformation. *The Yale Journal on Regulation*, 12(2).
- Hood, Christopher.1991. *A Public Management for All Season*; Public. Administration Vol. 69. Spring: Royal Institute of Public Administration.

- Kajimbwa, M. (2013). New Public Management: A Tribute to Margaret Thatcher. *Public Policy and Administration Research*, 3(5), 64–70.
- Osborne David and Gaebler Ted. 1992. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. United States: David Osborne and Ted Gaebler.
- Yamamoto, H. (2003). *New Public Management - Japan's Practice*. Institute for International Policy Studies, (January), 37.